Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 2, Agustus 2026, ***Pages*** **122-133**
P-ISSN : 2087-7307
htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SISTEM E-CATALOG LKPP (STUDI PENELITIAN DI PT. PRISLED INNOVATIVE LIGHTING INDONESIA)

Poripin[1], Christiani Prasetisari[2], Siti Nurkhotijah[3]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: [1]31122016@univbatam.ac.id ,[2]christiani.prasetyasari.@univbatam.ac.id, [3]sitinurkhotijah@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
UnlawfulActs, Government Procurement of Goods and Services, LKPP E-Catalog.

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam. ac.id

ABSTRACT

Government procurement of goods and services is a strategic instrument to support effective, efficient, transparent, open, fair, competitive, and accountable public administration. Indonesia implements electronic procurement through the LKPP E-Catalog system to facilitate transactions between government institutions and registered providers. However, the use of electronic systems may still generate legal disputes, including alleged misuse of user accounts and double accounts. This research examines the legal regulation of unlawful acts in government procurement through the LKPP E-Catalog and analyzes its implementation, obstacles, and solutions based on the case of PT Prisled Innovative Lighting Indonesia. The research uses a normative-juridical and empirical-juridical approach, supported by statutory, conceptual, and sociological approaches, literature study, document analysis, and interviews. The results show that the legal framework is based principally on Article 1365 of the Civil Code, the regulations on electronic transactions, Government Regulation Number 71 of 2019, Presidential Regulation Number 12 of 2021, and LKPP Regulation Number 9 of 2021. The dispute demonstrates that a transaction recorded in the E-Catalog can create potential losses for a provider when the ordering account is disputed by the named procurement official. Unlawful conduct may be established when an unlawful act, fault, actual loss, and causal relationship are proven. The main obstacles are uncertainty regarding the legal status of ordering notifications, weak coordination, suboptimal exercise of procurement authority, and limited legal protection for providers. Solutions

include stronger identity verification, clearer legal consequences for each transaction stage, improved supervision, competence and integrity of procurement officials, better com

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan proses yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Penggunaan Sistem E-Catalog LKPP mempermudah transaksi elektronik antara instansi pemerintah dan penyedia, tetapi dalam praktiknya masih terdapat potensi permasalahan hukum berupa penyalahgunaan akun, dugaan double account, dan sengketa transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa melalui Sistem E-Catalog LKPP serta implementasi, faktor kendala, dan solusi berdasarkan penelitian di PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yuridis sosiologis, didukung studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bertumpu pada Pasal 1365 KUHPerdata, ketentuan transaksi elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Kasus PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia menunjukkan bahwa notifikasi pemesanan melalui sistem dapat menjadi dasar tindakan penyedia untuk mempersiapkan barang dan menimbulkan kerugian ketika pemesanan kemudian disangkal oleh pihak PPK. Perbuatan melawan hukum dapat dinilai apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Kendala utama meliputi belum jelasnya status hukum notifikasi pemesanan, kurangnya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan kewenangan pejabat pengadaan, dan terbatasnya perlindungan hukum bagi penyedia. Solusi yang diperlukan meliputi penguatan verifikasi identitas, kejelasan akibat hukum setiap tahapan transaksi, peningkatan pengawasan, kompetensi dan integritas pejabat pengadaan, komunikasi yang lebih efektif, serta pengembangan fitur status transaksi secara real time.

Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, E-Catalog, LKPP, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan negara dan pelayanan publik. Dalam perkembangannya, pengadaan mengalami transformasi dari mekanisme konvensional menuju sistem elektronik yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas serta meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Sistem E-Catalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi salah satu sarana utama dalam proses pengadaan elektronik.

Secara normatif, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur antara lain dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Karena proses pemesanan dan transaksi berlangsung secara elektronik, ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta penyelenggaraan sistem elektronik juga relevan. Dalam perspektif hukum perdata, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Persoalan muncul ketika sistem elektronik yang seharusnya memberikan kepastian justru menjadi tempat timbulnya sengketa. PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia menerima pesanan melalui Sistem E-Catalog atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bekasi. Perusahaan menindaklanjuti pesanan tersebut dengan melakukan persiapan barang dan pengeluaran biaya, tetapi kemudian pihak PPK menyatakan tidak pernah melakukan pemesanan. LKPP selanjutnya menjelaskan adanya dugaan double account dengan identitas PPK yang sama tetapi berada pada wilayah berbeda. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai validitas identitas pengguna, keamanan sistem, tanggung jawab para pihak, dan perlindungan hukum bagi penyedia.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum perbuatan melawan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa pada Sistem E-Catalog LKPP; dan (2) bagaimana implementasi, faktor kendala, serta solusi terhadap perbuatan melawan hukum tersebut pada PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan kepastian hukum, perlindungan penyedia, dan tata kelola pengadaan pemerintah berbasis digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Sistem E-Catalog LKPP. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik berdasarkan fakta yang terjadi pada objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia, Kawasan Union Industrial Park Blok A No. 9, 10, dan 11, Batam. Populasi penelitian adalah pegawai perusahaan dengan jabatan Direktur, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan responden yang berkaitan langsung

dengan objek penelitian.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, dan sumber hukum lain yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan fakta penelitian dengan ketentuan normatif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem E-Catalog LKPP

Sistem E-Catalog merupakan sistem informasi elektronik yang dikelola LKPP dan memuat informasi mengenai barang dan/atau jasa, spesifikasi teknis, merek, asal produk, TKDN, SNI apabila dipersyaratkan, identitas penyedia, harga, serta informasi lain yang diperlukan dalam pengadaan. Sistem tersebut digunakan sebagai sarana E-Purchasing dan merupakan bagian dari transformasi digital pengadaan pemerintah.

Pengaturan hukum pengadaan melalui E-Catalog bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan negara hukum, KUHPerdata, ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik. Rangkaian ketentuan tersebut mengatur prinsip pengadaan, kewenangan pejabat, penggunaan sistem elektronik, keamanan sistem, pemesanan, dan transaksi.

Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar utama untuk menilai perbuatan melawan hukum. Unsurnya meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pengertian melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum, kesusilaan, serta kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Dalam pengadaan pemerintah, bentuk perbuatan melawan hukum yang relevan antara lain penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan sistem elektronik, manipulasi data pengadaan, dan persekongkolan. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan atau akun tidak sesuai prosedur. Penyalahgunaan sistem dapat berupa akses tanpa hak, penggunaan identitas pihak lain, atau manipulasi data. Manipulasi spesifikasi, harga, jumlah, maupun dokumen dapat merusak prinsip transparansi dan persaingan sehat.

2. Implementasi, Kendala, dan Solusi

Implementasi pengadaan melalui E-Catalog pada dasarnya telah memberikan mekanisme transaksi yang lebih cepat, terdokumentasi, dan terintegrasi. Namun, kasus PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan catatan elektronik belum otomatis

menghilangkan sengketa mengenai siapa yang benar-benar melakukan pemesanan. Karena itu, keamanan identitas pengguna dan kejelasan status hukum setiap tahap transaksi menjadi faktor penting.

Kendala pertama adalah belum optimalnya kepastian hukum mengenai status notifikasi pemesanan. Penyedia memahami notifikasi sebagai dasar untuk melakukan persiapan barang, sementara proses berikutnya ternyata tidak terlaksana. Perbedaan pemahaman tersebut dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Kendala kedua adalah kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara pejabat pengadaan dan penyedia.

Kendala ketiga berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pejabat pengadaan. Setiap tindakan dalam sistem dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi bagi penyedia. Kendala keempat adalah terbatasnya mekanisme perlindungan hukum bagi penyedia yang telah mengeluarkan biaya berdasarkan transaksi yang tercatat secara resmi.

Solusi yang diperlukan meliputi penguatan kepastian hukum terhadap notifikasi, persetujuan, dan pembatalan transaksi; peningkatan kompetensi dan integritas PA, KPA, PPK, serta pejabat pengadaan; penguatan pengawasan oleh APIP dan mekanisme evaluasi; serta peningkatan komunikasi resmi antara pejabat pengadaan dan penyedia. LKPP juga diharapkan mengembangkan fitur yang memberikan informasi secara real time mengenai status transaksi, persetujuan, dan pembatalan.

Selain penyempurnaan sistem, pencegahan harus dilakukan melalui kepatuhan terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 serta penerapan prinsip good governance. Penguatan autentikasi, verifikasi identitas, audit akun secara berkala, dan deteksi dini terhadap akun ganda dapat memperkecil kemungkinan penyalahgunaan akun. Bagi penyedia, prinsip kehati-hatian juga diperlukan, termasuk konfirmasi terhadap identitas pemesan apabila terdapat indikasi tidak lazim dan dokumentasi seluruh transaksi.

KESIMPULAN

Sistem E-Catalog LKPP merupakan instrumen pengadaan elektronik yang diarahkan untuk mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengaturan hukumnya bertumpu pada KUHPerdata, ketentuan transaksi elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Kasus PT. Prisled Innovative Lighting Indonesia menunjukkan adanya dugaan double account yang menimbulkan transaksi yang kemudian dipersoalkan oleh pihak yang identitasnya digunakan.

Secara yuridis, perbuatan dalam transaksi E-Catalog dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Kendala utama terletak pada kepastian status transaksi,

koordinasi, pelaksanaan kewenangan pejabat, dan perlindungan penyedia. Pencegahan memerlukan penguatan verifikasi identitas, pengawasan, kompetensi dan integritas pejabat, komunikasi, serta fitur transaksi real time.

SARAN

Pemerintah dan LKPP perlu memperkuat keamanan E-Catalog melalui verifikasi identitas, autentikasi berlapis, audit akun secara berkala, dan deteksi akun ganda. Regulasi dan prosedur operasional juga perlu memperjelas kapan notifikasi pemesanan menimbulkan hak dan kewajiban serta bagaimana pembagian tanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan akun.

Penyedia barang dan jasa perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan konfirmasi identitas apabila ditemukan transaksi yang tidak lazim serta menyimpan seluruh bukti transaksi secara lengkap. Penguatan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa juga diperlukan agar penyedia memperoleh kepastian ketika telah melakukan tindakan dan pengeluaran berdasarkan transaksi yang tercatat dalam sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agustina, Rosa. (2022). Perbuatan Melawan Hukum. Edisi Revisi. Agustina, Rosa. (2022). Perbuatan Melawan Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ali, Achmad. (2022). Menguak Teori Hukum (Legal Theory). Jakarta: Kencana.

Arsyad, Jawade Hafidz dan Dian Karisma. (2022). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Danil, Elwi. (2021). Tindak Pidana Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, Lawrence M. (2021). Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusamedia.

Fuady, Munir. (2022). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Makarim, Edmon. (2022). Hukum Sistem dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. (2023). Membangun Hukum Berbasis Keadilan Digital. Yogyakarta: Nusa Media.Riawan Tjandra, W. (2022). Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Prenadamedia Group.

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Cikarang.

Simamora, Y. Sogar, Faizal Kurniawan, Bagus Oktafian Abrianto, dan Rizky Amalia. (2023). Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Surabaya: Airlangga University Press. Soekanto, Soerjono. (2021). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Subekti. (2021). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Sutedi, Adrian. (2022). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjoanda, Merry. (2023). Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta: Deepublish.

Tukimun, dkk. (2023). Pengantar Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Makassar: Tohar Media.

Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Jurnal

Agustina, Rosa, 2023, "Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2.

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas*

Batam, *14*(1).

Alysa Ramadhani M., dkk., 2026, "Analisis Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Perdata", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 5, No. 1.

Bagus Gunawan dan Tamaulina Br. Sembiring, 2024, "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata", *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 5.

Benny Simanjuntak, Samuel Sinaga, Togar Manullang, dan Martua Pasaribu, 2025, "Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Sosiologis", *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, Vol. 3, No. 2.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Brydges, M. dan Batt, A. M., 2023, "Untangling the Web: The Need for Theory, Theoretical Frameworks, and Conceptual Frameworks in Paramedic Research", *Paramedicine*, Vol. 20, No. 4.

Cahyaningrum, Dian, 2022, "Implementasi Good Governance dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1.

Choiri, Ilham dan Hadi, Hendra, 2025, "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru dan Sistem E-Katalog terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, Vol. 4, No. 2.

Danis, Ananda Harfa, 2025, "Konsep Penerapan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3.

Darmawan, Herniwan, dkk., 2023, "Analisa Tingkat Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Berdasarkan Cara, Jenis, dan Metode Pengadaan di Indonesia", *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, Vol. 2, No. 2.

Engkus, 2026, "Menjembatani Teori dan Praktik: Peran Grand Theory,Middle Range Theory, dan Applied Theory dalam Pengembangan Ilmu Administrasi Publik", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 1.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Flora, Henny Saida, Thuong, Mac Thi Hoai, dan Erawati, Ratna Deliana,2023, "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 169-177.

Hardiyan, Sandi Pratama, 2023, "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Perspektif Hukum*, Vol. 23, No. 2.

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Helmi, Muhammad Ishar, 2022, "Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 6.

Hendrio, 2024, "Urgensi Penerapan E-Katalog terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, Vol. 6.

Hutabalian, Maslon, 2022, "Tinjauan Hukum tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 8, No. 2.

Ibrahim, Danie dan Phahlevy, Rifqi Ridlo, 2024, "Implementasi Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Marzuki, Peter Mahmud, 2022, "The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems", *Yuridika*, Vol. 37, No. 1.

Muhamad Yusuf dan R. Diah Imaningrum, 2022, "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2.

Mulya, Indra Irawan, 2023, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2.

Nurhikmahyanti, D., 2024, "Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia", *Jurnal*

Pengadaan Barang dan Jasa, Vol. 3, No. 2.

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 88-112.

Prasetia, Ira Kurnia dan Soleh, Moh., 2024, "Penerapan Prinsip Persaingan Usaha atas Pelaksanaan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Journal Evidence of Law*, Vol. 3, No. 1.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal PendekarNusantara*, *2*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(1), 198-201.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*,

1(1), 13-25.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 100-105.

Pratiwi, M. A., 2022, "The Differences Between Theoretical Framework and Conceptual Framework in Scientific Research", *Idealog: Ide dan Dialog Desain Indonesia*, Vol. 7, No. 2.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Putra, Hadian Indrawan, Purba, Hasim, Siregar, Mahmul, dan Harianto, Dedi, 2023, "Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Rusli, Tami, 2023, "Efektivitas Penerapan E-Catalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 3.

Sari, Sinta Puspita, Syalsabila, Amyra, Yulianti, Silvi, dan Purwoko, Sigit Djalu, 2024, "Studi Literatur Cara Menjadi Penyedia E-Katalog pada LKPP sebagai Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaku Usaha", *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Sugiharto, R. dan Mashdurohatun, Anis, 2023, "Problematika Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis

Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Tri Wahyuni Arum Sari dan Sukirno, 2022, "Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Notarius*, Vol. 15, No. 2.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1), 16-30.

Wardhani, Harumsari Puspa dan Ningsih, Ayup Suran, 2024, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1.

Widhi, Altarazhi Bramantio, 2023, "Efektivitas Layanan E-Catalogue oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 13, No. 1.

Yuflikhati, Nur Laila, dkk., 2025, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana", *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1.